

**ANALISIS STRATEGI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN
(STUDI KASUS UPAYA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DARI DKI JAKARTA
KE KUTAI KARTANEGARA DAN PENAJAM PASER UTARA)**

**STRATEGY ANALYSIS RELOCATION OF THE CAPITAL CITY OF INDONESIA
FROM DEFENSE ECONOMIC PERSPECTIVE
(CASE STUDY OF RELOCATION OF THE CAPITAL CITY FROM DKI JAKARTA TO
KUTAI KARTANEGARA AND PENAJAM PASER UTARA)**

Surya Dwi Saputra¹, Thomas Gabriel J², Mhd Halkis³

PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN, FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN

(suryadwisaputra@gmail.com, jostgebi@gmail.com, halkis@idu.ac.id)

Abstrak - Upaya Pemindahan ibu kota negara (IKN) merupakan *major project* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah diwacanakan pemerintah sejak lama melalui Kementerian PPN/Bappenas selaku *leading sector*. Maka dari itu diperlukan studi mengenai transisi pemindahan IKN terutama dari sisi ekonomi dan pertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi *ends* (tujuan), *means* (sarana) dan *ways* (cara/langkah) dalam upaya pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan PPU dari perspektif ekonomi pertahanan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui proses reduksi data dan kodifikasi perangkat lunak Nvivo 12. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, FGD dan *library research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dipertimbangkan kembali urgensi pemindahan IKN terutama dari analisis strategi bahwa (1) Tujuan dasar pemindahan IKN adalah pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan pertahanan negara, (2) Sarana yang dimiliki dalam upaya pemindahan IKN, selain didukung dengan SDM dan instansi terkait, juga dengan potensi unggulan yang dimiliki Kalimantan Timur. Dukungan kebijakan serta alternatif skema pembiayaan juga diperlukan untuk mendukung tercapainya pemindahan IKN, (3) Cara/langkah yang diterapkan oleh kementerian atau lembaga terkait, yakni membuat kerangka kerja khusus dan paket strategi, mengoptimalkan peluang dan kekuatan serta antisipasi terhadap hambatan dan ancaman. Kesimpulannya bahwa strategi yang diterapkan dalam upaya pemindahan IKN diharapkan dapat mendukung perwujudan ekonomi pertahanan dengan terbentuknya sistem IKN baru yang memiliki instrumen pertahanan nirmiliter (*bargaining power*) serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan umum.

Kata kunci: Tujuan, Sarana, cara/langkah, Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Ekonomi Pertahanan.

Abstract - *The efforts to relocate the capital city are a major project in the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) that the government has been discussing for a long time through the Ministry of PPN/Bappenas as the leading sector. Therefore, it is necessary to study the transition of IKN, especially from the economic and defense side. This study aims to analyze the strategy ends, means and ways in the effort to relocate the capital city from DKI Jakarta to Kutai Kartanegara and PPU from defense economics perspective. This research is a descriptive qualitative research with a case*

¹ Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan

² Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan

³ Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan

study through the process of data reduction and codification of Nvivo 12 software. Collecting data uses interviews, observation, FGD and library research methods. The results of this study indicate that it is necessary to reconsider the urgency of moving the IKN, especially from the strategic analysis that (1) Ends of Indonesia's policy strategy in the effort to move IKN are economic development, equitable development and improvement of national defense; (2) Means owned in the effort to move the IKN, besides supported by human resources and related agencies, also use the facilities, resources and potential of East Kalimantan. Policy support and alternative financing schemes also needed to support the relocation of the capital city; (3) Ways applied by relevant ministries or institutions, especially the Ministry of PPN/Bappenas, Ministry of Finance and Ministry of Defense in moving IKN, namely by forming a special framework, strategic packages, optimizing opportunities and strengths as well as the anticipation of obstacles and threats. The conclusion is that the strategy implemented in the effort to move the IKN is expected to support the realization of the defense economy with the formation of a new IKN system that has a non-military defense instrument (bargaining power) and its contribution to improving the general welfare.

Keywords: Ends, Means, Ways, Relocation of the Capital City, Defense Economy

Pendahuluan

Upaya pemindahan ibu kota negara akhir-akhir ini menjadi isu hangat bagi masyarakat global dan pemerintah, terlebih di daerah Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai lokasi pemindahan ibu kota baru nantinya. Upaya pemindahan ibu kota negara (IKN) ini sendiri sebenarnya telah menjadi wacana pemerintah sejak lama, namun baru belakangan ini mulai tahun 2017 melalui Kementerian PPN/Bappenas upaya tersebut kembali dimunculkan.

Pemindahan ibu kota negara dari jakarta ke Kalimantan Timur menyisakan sejumlah tanda tanya, bagaimana *grand design* dari sebuah ibu kota negara nantinya. Sejumlah permasalahan menjadi dasar mengapa pemindahan ibu kota harus disegerakan. Pertama, yaitu

kepadatan penduduk terutama di wilayah Jakarta dan pulau Jawa. Kedua, Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang juga menjadi alasan kuat pemindahan Ibu Kota Negara. (Shalih et al., 2018).

Dari perspektif kebencanaan, Pulau Jawa rawan bencana gempa bumi dan Banjir, terlebih Jakarta yang berada dalam *ring of fire*. Selain itu, Lalu lintas dan permukiman di Jakarta macet, penuh sesak dan kumuh. Kondisi di atas tentu sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 56 triliun per tahun. Masalah berikutnya yakni kualitas dan ketersediaan air bersih yang merupakan sarana vital bagi warga ibu kota. Lapangan pekerjaan dan kesenjangan sosial serta masalah lainnya juga sudah sangat mendesak. Jakarta

dianggap terlalu padat sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi (Balitbang Pontianak, 2018).

Perpindahan ibu kota nantinya selain memiliki dampak positif tentu memiliki dampak negatif, terutama jika dipaksakan di tengah situasi pandemi saat ini. Kondisi perekonomian Indonesia belum stabil sebagai akibat pandemi covid-19 di mana pemulihan ekonomi akan terus berlanjut hingga 2021 (Alika, 2020). Indonesia membutuhkan stimulus dan alternatif skema pembiayaan untuk merealisasikan pemindahan IKN. Daya dorong pembangunan ibu kota tak cukup memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi. Kajian Indef di awal 2020 menunjukkan pemindahan IKN hanya memicu 0,02 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak signifikan hanya dirasakan oleh provinsi bersangkutan saja dengan kenaikan pertumbuhan sekitar 3,14 persen (Thomas, 2020).

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur seharusnya tidak hanya menitikberatkan aspek perekonomian saja, namun juga dari segi aspek sosial, aspek lingkungan, geopolitik, terlebih aspek pertahanan. Penting bagi Indonesia mempertimbangkan kehati-hatian dalam konsep pembangunan ibu

kota. Ada kekhawatiran terkait potensi tergerusnya budaya setempat dan terpinggirnnya masyarakat lokal yang menuntut adanya perencanaan yang serius dari pemerintah pusat untuk menghindari dampak sosial jika wacana pemindahan ibu kota tersebut benar-benar terwujud (Taufik, 2017).

Perlu adanya kesiapan dan antisipasi dari semua elemen yang terlibat, baik pemerintah, pakar, maupun media yang berperan penting dalam membangun persepsi dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman yang dihadapi sesuai karakteristik wilayah tersebut. Hal ini karena masyarakat merupakan aktor yang memainkan peran penting dalam pertahanan dan keamanan nasional atau yang lebih kita kenal dengan sistem pertahanan rakyat semesta (sishankamrata) (Supriyatno, 2018).

Pertahanan adalah suatu komponen yang sangat penting bagi setiap Negara berdaulat. Dari perspektif ilmu pertahanan, maka salah satu pertimbangan penetapan ibu kota adalah pengendalian keamanan nasional, termasuk di dalamnya adalah pengendalian pertahanan negara (Kementerian Pertahanan, 2016). Ibu kota suatu negara akan menjadi Markas

Komando Militer yang diharapkan mampu bereaksi menghadang kekuatan musuh saat bergerak memasuki wilayah terluar sekaligus menjadi pusat kendali dalam menghadapi situasi atau fenomena ancaman yang tidak terduga seperti wabah pandemi saat ini (Shalih et al., 2018).

Dalam perspektif ekonomi pertahanan, pemindahan ibu kota perlu memperhatikan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi yang diaplikasikan nantinya. Termasuk di dalamnya pengeluaran-pengeluaran pertahanan, baik domestik maupun internasional, serta variabel-variabel ekonomi makro seperti pendapatan nasional, tenaga kerja, output, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan global yang semakin meniadakan batas antarnegara telah menciptakan tantangan baru. Untuk itu, suatu negara harus menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pilar pertahanan nasional untuk bertahan dalam persaingan global (Setiadji, 2019).

Perlu adanya *design* pemindahan ibu kota negara baru (IKNB) dari aspek ekonomi dan juga pertahanan dengan mempertimbangkan adanya eskalasi ancaman seperti pandemi, perubahan

iklim, kerusakan lingkungan, migrasi dan fenomena lainnya sebagai ancaman keamanan serius (Setiadji, 2019). Artinya, di era yang semakin maju ini, sudah saatnya untuk meng-upgrade dan mengadopsi gagasan keamanan yang lebih luas yang melampaui pertimbangan militer dan anggaran alutsista saja.

Strategi pemindahan ibu kota negara baru ini tentunya tanpa mengesampingkan aspek ekonomi dan pertahanan konvensional seperti penambahan alokasi anggaran bidang pertahanan untuk penambahan jumlah personel dan satuan baru, serta pemutakhiran Alutsista yang lebih modern dalam mendukung tugas pengamanan Ibu Kota Negara yang baru. Keduanya harus berjalan beriringan guna menghadapi ancaman militer, ancaman nirmiliter dan ancaman hibrida. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis strategi *ends* (Tujuan), *means* (Sarana) dan *ways* (cara/langkah) dalam upaya pemindahan ibu kota negara dengan judul “Strategi Pemindahan Ibu kota Negara Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara dan PPU)”.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Menurut Creswell (2003), penelitian kualitatif merupakan proses pemahaman yang dilakukan melalui metode mencari tahu dalam mencari makna dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sedangkan Studi kasus menurut Creswell (2008) merupakan strategi penelitian yang di mana di dalamnya peneliti akan menyelidiki secara teliti dan cermat terhadap suatu program, peristiwa, proses, aktifitas, atau sekelompok individu. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dinilai sesuai untuk dilakukan karena penelitian ini berupaya memahami sebuah masalah sosial serta hubungan antar seluruh aktor yang terlibat di dalamnya.

Analisis permasalahan dan pembahasan dilakukan secara mendalam menggunakan berbagai jenis sumber data mulai dari observasi lapangan, FGD hingga wawancara mendalam dengan informan yang diolah dengan alat analisis perangkat lunak komputer NVivo 12, sehingga perumusan saran tindak untuk seluruh aktor yang terlibat dapat dilakukan melalui kajian yang

komprehensif dan memiliki keabsahan serta keterandalan data yang tinggi.

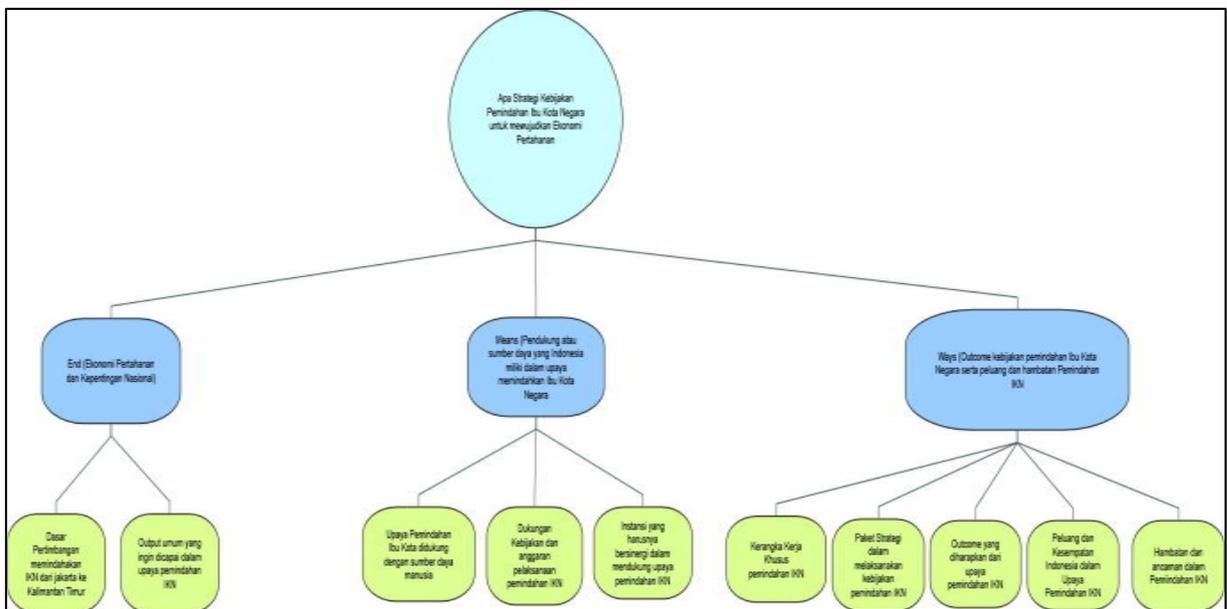
Penelitian dilakukan di dua lokasi yang berbeda, pertama di Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara, kedua di Jakarta sebagai pusat pengumpulan data melalui wawancara dengan informan. Beberapa lokasi yang dituju adalah Pemda Kaltim, Pemda PPU, Kodam VI Mulawarman, Lanal Balikpapan, Lanud Dhomber Balikpapan, Kodim 0913/PPU, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, untuk mempertajam analisis, penelitian ini juga akan menggunakan teknik *in-depth interview* yang akan dilakukan bersama para ahli terkait pemindahan ibu kota dari perspektif ekonomi pertahanan.

Analisis data nantinya menggunakan indikator model teori strategi yang dikemukakan oleh Liddle Hart, yaitu indikator: 1). *Ends* (tujuan) 2). *Means* (sarana), 3). *Ways* (cara). Data yang telah dikumpulkan tersebut dipilah sesuai kebutuhan pertanyaan penelitian dan diolah menggunakan *software* NVivo 12 untuk kepentingan triangulasi data yang telah dikumpulkan. Creswell (2008) memberikan beberapa tahapan dalam proses analisis data yaitu : Mengolah data

dan mempersiapkan data untuk dianalisis, menganalisis lebih detail dengan mengoding data dan menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori kategori dan tema-tema yang akan ditulis dalam narasi atau laporan kualitatif, termasuk menginterpretasikan data.

Hasil dan Pembahasan

Tahap awal peneliti melakukan coding dengan menyusun *Mind Map* (peta konsep pemikiran) untuk mengelaborasi rumusan masalah hingga ke objek penelitian. Pembuatan *mind map* ini membantu peneliti dalam menyusun kode penelitian. *Mind map* disusun sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 1 di bawah ini.

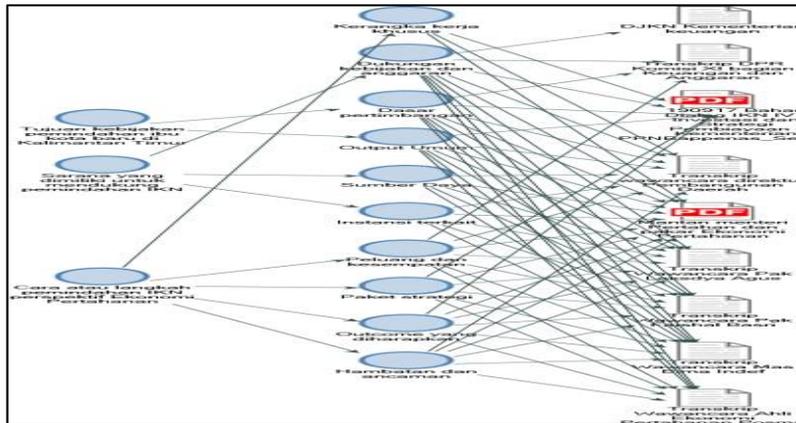


Gambar 1. *Mind Map* Penelitian

Sumber: diolah peneliti berdasarkan data primer dan sekunder, 2020

Berdasarkan Gambar 1 di atas Peneliti memperoleh kode untuk dijadikan dasar melakukan koding terhadap data wawancara dari narasumber. Kode tersebut selanjutnya disusun menjadi sebuah *Project map* yang utuh untuk membantu peneliti melihat gambaran keseluruhan data hasil penelitian.

Adapun selanjutnya Gambar 2 menunjukkan hasil coding data wawancara secara keseluruhan pada penelitian ini.



Gambar 2. Project Map Penelitian Keseluruhan
 Sumber: diolah peneliti berdasarkan data primer dan sekunder, 2020

Dari hasil wawancara yang telah dikoding maka didapatkan nodes jawaban pertanyaan penelitian mengenai tujuan, sarana dan cara/langkah dalam sebuah strategi dalam upaya pemindahan ibu kota negara. Proses coding (olah data penelitian) sebagai langkah awal untuk analisis data. Selain itu uji validitas menggunakan triangulasi sumber telah dilakukan dengan melihat arah hubungan dari setiap nodes dengan jawaban para narasumber. Dapat diperoleh bahwasanya jawaban dari setiap narasumber dapat dipersaksikan dengan narasumber lainnya sehingga data dapat dikatakan valid dan reliabel.

Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan

Dari perspektif ilmu ekonomi pertahanan, salah satu pertimbangan penetapan ibu kota adalah dari perencanaan harus paling efisien.

Ekonomi pertahanan berfikir membangun pertahanan dari defisini ekonomi, *need* atau kebutuhan, *me mixing* dari *capital* and *labour*. Berapa modal yang di butuhkan dalam upaya pemindahan ibu kota negara dan berapa modal yang harus ditempatkan. Pemindahan ibu kota perlu memperhatikan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi yang diaplikasikan nantinya. Suatu negara harus menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pilar pertahanan nasional untuk bertahan dalam persaingan global. Termasuk di dalamnya pengeluaran-pengeluaran pertahanan, baik domestik maupun internasional, serta variabel-variabel ekonomi makro seperti pendapatan nasional, tenaga kerja, output, dan inflasi. Ibu kota negara baru di masa mendatang, keamanannya

terjamin dengan pertahanan yang kuat, tanpa mengorbankan kesejahteraan untuk meningkatkan utilitas atau manfaat. Itulah munculnya ekonomi pertahanan (Hartley, 1995).

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis strategi pemindahan ibu kota negara dalam perspektif ekonomi pertahanan, peneliti menyusun rumusan masalah dan pedoman wawancara penelitian menggunakan indikator model teori strategi yang dikemukakan oleh Little Hart, yaitu indikator: 1). *Ends* (tujuan) 2). *Means* (sarana), 3). *Ways* (cara). Indikator ini juga sejalan dengan pengertian strategi menurut Gen. US Army (Ret) Andrew J. Good Paster, “*Strategy covers what we should do (ends), how we should do it (ways), and what we should do it with (means)*”(Mintzberg, 1991).

Dari teori tersebut, esensi strategi merupakan proses pengambilan keputusan terhadap elemen-elemen utama dari suatu strategi, meliputi *Ends* (sasaran, *goals, objective, target*), *Ways* (cara bertindak, *course of actions, concept, methode*) dan *Means* (sarana, kekuatan, sumber daya, potensi). Selanjutnya di dalam merumuskan strategi, perlu dipertimbangkan untuk uji kelayakan strategi, yang meliputi;

Suitable (sesuai dengan yang diharapkan), yaitu *Desirable effects (ends)*, sasaran yang ditentukan harus mampu menimbulkan rangsangan motivasi untuk dicapai ; *Feasible* (layak dilakukan), yaitu *Capable of being done (ways)*, konsep/cara-cara yang dirumuskan mampu untuk dilaksanakan dan *Acceptable* (masuk akal), yaitu *Reasonable cost (means)*, sarana/sumber daya dan peralatan lain yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan yang mencukupi.

Ends (Tujuan) Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Baru Di Kalimantan Timur

Pertimbangan untuk memindahkan ibu kota sendiri sudah dimulai sejak lama, sejak masa pemerintahan soekarno (1957), kemudian baru belakangan ini, muncul kembali rencana pemindahan IKN ini tepatnya di periode kepemimpinan Jokowi yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 pada poin arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan, yaitu pengembangan rencana pemindahan ibu kota ke luar pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi. Rencana ini juga masuk ke dalam *major project* Pemindahan ibu kota Negara untuk

memeratakan kesejahteraan masyarakat antar wilayah.

Dasar Pertimbangan Pemindahan IKN

Dalam upaya pemindahan ibu kota negara (IKN) tentu harus mempertimbangkan dampak serta manfaat dari pindahnya ibu kota negara ke lokasi yang baru. Jika melihat kondisi sekarang yang terjadi di ibu kota, Jakarta memiliki beban berat untuk menjalankan roda perekonomian serta roda pemerintahan sekaligus, tampaknya menjadi suatu keputusan yang tepat jika Indonesia mengupayakan untuk memindahkan ibu kota negaranya ke lokasi baru yang lebih strategis dan bisa dikembangkan, dalam hal ini Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Pemindahan ibu kota harus dimulai dari pertimbangan perencanaan yang paling efisien.

Masalah kemacetan kronis, ancaman banjir, dan sebagainya yang dialami Jakarta, hanyalah sisi kecil dari dasar pertimbangan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Sisi kecil itu saja sudah amat penting, karena ia harus dilihat sebagai penanda bahwa sebenarnya persoalan di Ibu Kota Jakarta sudah terlampaui berat karena tidak adanya kebijakan visioner yang menjadi acuan dalam tiga puluh tahun terakhir.

Dengan kata lain, usulan agenda pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan ini adalah usulan kongkrit untuk membalik paradigma pembangunan yang terbukti saat ini mewarisi setumpuk masalah.

Sejumlah masalah besar di ibu kota masih tercermin dalam mengantisipasi urbanisasi yang cepat seiring dengan berkembangnya gejala kesenjangan dan segregasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, berbagai jenis infrastruktur permukiman dan transportasi di Jakarta sangat jauh dari memadai, yang ditandai dengan kemacetan parah, pelayanan transportasi publik yang kurang maksimal, permukiman kumuh dan ilegal yang semakin bertumbuh, sistem drainase dan sanitasi yang buruk, pasokan energi dan listrik yang tidak stabil, dan sebagainya.

Sejumlah problem di atas bukan hanya mengganggu kinerja Pemerintahan yang ditandai dengan ragam masalah yang muncul setiap hari, namun juga masa depan Jakarta sebagai sebagai ibu kota negara yang juga berfungsi sebagai kawasan instalasi strategis negara. Ancaman terhadap Jakarta ini memberikan ketidakpastian akan masa depan Jakarta, dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, apakah masih dapat

menjalankan perannya sebagai ibu kota NKRI ?, Tidak ada satu pihak pun yang mampu menjamin. Dari perspektif ini, pemindahan ibu kota ke suatu lokasi strategis harus direncanakan dengan baik dalam mengemban peran baru sebagai ibu kota negara untuk jangka waktu yang berkesinambungan.

Adapun dasar pertimbangan berdasarkan kajian dari Kementerian PPN/Bappenas dalam menentukan lokasi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur diantaranya adalah:

- a. lokasi strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia;
- b. tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi;
- c. lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut;
- d. Tersedia sumber daya air cukup dan bebas pencemaran lingkungan; dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, meliputi
 - 1) akses mobilitas/logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan;
 - 2) ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk

mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau; dan

- 3) tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan;
- 4) potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang;
- 5) memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Artinya kajian yang telah dilakukan Bappenas dalam hal ini sebagai leading sector, jika ditinjau dari perspektif ilmu ekonomi pertahanan, dapat dinilai cukup efisien. Upaya pemindahan ibu kota merupakan rencana strategis jangka panjang (*long term*), di mana pertimbangan-pertimbangan agar ekonomi dapat tumbuh secara signifikan telah dipertimbangkan dengan baik tanpa mengesampingkan sektor pertahanan. Pemindahan IKN juga mendorong investasi yang lebih luas, dengan perkiraan peningkatan real GDP nasional sebesar 0,1-0,2 persen, seiring dengan terjadinya penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Kenaikan *price of capital* ditargetkan sebesar 0,23 persen dan kenaikan *price of labour* 1,37 persen.

Tujuan Pemindahan IKN

Dalam perspektif ekonomi pertahanan, tujuan pemindahan ibu kota negara yakni pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, indikasinya ialah ibu kota negara baru nantinya harus dapat membawa dampak pada pertahanan, harus ada peningkatan pertahanan dan keamanan demi kedaulatan negeri, tanpa mengesampingkan tujuan utama Ibu kota itu sendiri. Ibu Kota sejatinya merupakan sebuah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara, secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan

Muara dari dua sisi tadi akan berujung pada tujuan puncak dari pengelolaan bangsa Indonesia di masa depan, yakni pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan, dan lahirnya wajah Indonesia yang bisa dibanggakan. Dengan kata lain, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur adalah sebuah aksi strategis yang besar diantara beberapa aksi strategis lainnya yang diperlukan untuk mewujudkan paradigma baru pembangunan yang selama ini hanya

hadir sebagai wacana yang menggantung, karena ia memiliki perkiraan efek jangka panjang yang jelas dan berkelanjutan.

Dalam ekonomi, ada dua strategi secara umum, yakni *long run and short run*, di mana upaya pemindahan ibu kota negara ini termasuk ke dalam rencana jangka panjang. Artinya tidak bisa berharap dalam waktu singkat pemindahan ibu kota negara langsung dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia dan rakyatnya secara menyeluruh. Upaya pemindahan ibu kota harus diamankan dengan strategi jangka pendek. Tentu dalam perjalanannya akan ada hambatan dan tantangan, namun hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar, mengingat akan selalu ada *shock* dalam ekonomi, terutama *long run strategic*.

Outcome yang diharapkan

Outcome pemindahan IKN yang diharapkan di antaranya adalah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Harapan besar dari pemindahan IKN ini berupa dampak positif pertumbuhan PDB meningkat, pendapatan perkapita masyarakat ikut meningkat, lapangan

pekerjaan bertambah, dan juga SDM lebih banyak terserap dari masyarakat disekitar lokasi pemindahan ibu kota baru, sehingga berpengaruh terhadap pemerataan ekonomi dan pemerataan pembangunan Indonesia. Dari sisi pertahanan diharapkan industri pertahanan itu bisa tumbuh dan membaik untuk menopang pemerataan wilayah pertahanan di Indonesia, (tidak terkonsentrasi di Jawa. Jadi outcome di ekonomi pertahanan tetap sama seperti ekonomi, yaitu kesejahteraan).

Dari sisi ekonomi, harapan dari pemindahan ibu kota negara dapat membawa dampak yang signifikan. Hal ini sesuai dengan kajian Bappenas dalam penelitian (Gustinara, 2019), beberapa outcome yang diharapkan sebagai dampak ekonomi pemindahan ibu kota negara yaitu: tidak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional, produk domestik bruto bertambah sebesar 0.1%, dapat menurunkan kesenjangan pendapatan, inflasi terkendali dengan estimasi tambahan laju sebesar 0.2%, mendorong perdagangan antar wilayah serta mendorong lahirnya investasi-investasi di lokasi IKN baru.

Namun tujuan akhir atau outcome yang diharapkan dari upaya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang

terpenting Kemudian yakni dapat menciptakan kota yang harapannya *sustainable* atau berdampingan dengan hutan dan lingkungan hidup sesuai dengan konsep masterplan ibu kota baru yakni *smart, green, beautiful*. Ibu Kota negara baru dibutuhkan kedepannya untuk mencerminkan identitas bangsa yang modern dan berkelas internasional (*smart, green, and beautiful city*) (Setkab Bappenas, 2019).

Dukungan Tercapainya Tujuan Terhadap Kepentingan Nasional

Agenda pemindahan ibu kota tentunya bukan semata didasarkan pada pertimbangan ancaman dan ketidaklayakan Jakarta, melainkan didasarkan pada visi ke depan tentang tata kelola pembangunan kawasan dan antarkawasan secara nasional. Oleh karena tujuan pemindahan ibu kota itu bukan bersifat tunggal, maka ia harus berisi beberapa rencana tindakan strategis di bidang ekonomi, pembangunan kawasan, pemerintahan, politik, hukum, kebudayaan, dan tatanan sosial, yang kesemuanya bergerak saling mendukung, bukan merupakan masing-masing dinamika yang terpisah. Walaupun nantinya hal ini tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik.

Tujuan besar dari pemindahan ibu kota yang berlandaskan pada pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan bentuk tindak lanjut dari sebuah upaya pertahanan negara Indonesia. Suatu usaha yang dapat di upayakan dari pemindahan ibu kota negara dalam hal ini adalah sebuah peningkatan pertahanan nirmiliter, terutama menyesuaikan dimensi dari ancaman yang ada, termasuk dari dimensi ekonomi. Negara yang kuat perekonomiannya serta memiliki bargaining power di posisi tertentu dapat menjadi instrumen pertahanan agar meminimalisir kemungkinan negara lain untuk mengganggu atau menggoyahkan kepentingan nasional negara Indonesia.

Dukungan tercapainya tujuan terhadap Ekonomi Pertahanan

Sudut pandang ekonomi pertahanan cukup luas, ekonomi pertahanan berkaitan dengan isu-isu pertahanan (Yusgiantoro, 2014). Masalah pemindahan ibu kota juga terkait dengan interaksi strategis, kemudian pembentukan alokasi sumber daya, ekonomi pasar sebagai sumber daya pertahanan, mobilisasi kekuatan, kemudian optimalisasi kekuatan pertahanan dan pemanfaatan modal

tenaga kerja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ekonomi pertahanan adalah cabang dari disiplin ilmu yang mencermati berbagai isu pertahanan negara secara luas, dan dalam hal ini termasuk juga upaya pemindahan ibu kota negara yang merupakan suatu rencana besar dan melibatkan banyak sumber daya di dalamnya (Supandi, 2019).

Upaya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dapat dilihat dari gelas yang berisi setengah air, memang ada probabilitas gagal jika melihat dari sisi gelas kosong, namun juga bisa dilihat dari segelas penuh untuk probabilitas sukses. Tergantung siapa dan bagaimana menjalankan rencana yang telah disusun dengan kajian-kajian yang ada. Tujuannya untuk mengeliminir *gap* antara kenyataan dengan perencanaan, sehingga apapun choice yang dipilih, itu yang terbaik dan berhasil nantinya. Ekonomi pertahanan dalam hal ini mengawalinya, melihat ada kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi yang harus segera di penuhi, sebagai contoh, kurangnya pertahanan maka harus segera ditingkatkan, kurangnya anggaran harus segera dipenuhi, adanya investasi asing yang masuk bisa memperlemah dan patut diwaspadai. Dari sisi tersebutlah pemindahan ibu kota negara perlu dikaji

lebih lanjut dalam perspektif ekonomi pertahanan.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai *Ends* atau tujuan dari upaya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, didapatkan kesimpulan bahwa tujuan strategi Indonesia dalam upaya pemindahan IKN yakni pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan pertahanan negara. Tujuan tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan tujuan ekonomi pertahanan yang berlandaskan pada dasar pertimbangan yang tepat untuk dapat mendukung tujuan kesejahteraan umum dan keamanan negara. Bappenas sebagai *leading sector* berupaya memindahkan ibu kota negara dengan dukungan seluruh pihak sebagai jalan instrumennya. Memberikan potensi kontribusi positif pada peningkatan kesejahteraan umum dan kemandirian ekonomi serta peningkatan terhadap pendapatan negara merupakan output jangka panjang yang ingin dicapai. Strategi pemindahan IKN ini akan berimplikasi pada terwujudnya kekuatan ekonomi nasional yang dapat menjadi *bargaining power* sebagai instrumen pertahanan nirmiliter dari dimensi ekonomi demi

menjaga kepentingan nasional negara Indonesia.

Means (Sarana Yang Dimiliki Untuk Mendukung Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara)

Diharapkan nantinya dengan pemindahan ibu kota negara mampu meningkatkan akses untuk mendapatkan sumberdaya, keuangan, dan pasar yang lebih potensial. Hal ini selaras dengan teori keamanan ekonomi bahwa bagaimana akses untuk mendapatkan sumber daya, keuangan, dan pasar merupakan elemen penting dalam kelangsungan tingkat kemakmuran negara.

Dukungan Sumber Daya

Jika kita tinjau dari perspektif ekonomi pertahanan, di mana ekonomi itu ialah bagaimana manusia atau organisasi memenuhi kebutuhannya. Ada kata kunci *need* (kebutuhan) dengan *resources* sumber daya yang terbatas, sehingga karena *scarce*, karena kelangkaan sumber daya itu, maka kita harus lakukan *choice* (pilihan) kebijakan yang paling efisien dari sisi ekonomi dan juga pertahanan. Dalam ekonomi, sumberdaya itu dibagi ke dalam dua bagian besar yaitu *capital and labour* untuk mempermudah perhitungan matematisnya, jadi Sumber daya itu ada

modal dan manusia. Itulah yang akan di *Mix* berapa bagian modal berapa bagian manusia.

Indonesia sangat memerlukan pembangunan *growth pole* lain di luar Pulau Jawa, karena saat ini 80 persen industri nasional berlokasi di Jawa (Hutasoit, 2018) . Kalimantan Timur sendiri dalam hasil kajian yang telah dilakukan Bappenas menunjukkan hasil penilaian luas deliniasi kawasan sebesar 180.965 hektar dan yang potensial sebesar 85.885,83 hektar. Kuantitas air permukaan diperoleh melalui tiga Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sanggai/Sepaku, Samboja, dan Dondang. Daya dukung air tanah di lokasi deliniasi sebagian besar termasuk ke dalam kelas rendah. Wilayah deliniasi tidak memiliki historis kebakaran hutan. Sebagian besar wilayah deliniasi merupakan hutan, tetapi hanya beberapa *hotspot* saja yang menjadi pemicu kebakaran utama. Titik lokasi kebakaran berada di sisi selatan Samboja dan Sepaku serta di bagian Tahura.

Selain itu, ketersediaan lahan yang cukup luas untuk pembangunan infrastruktur pemerintah serta lokasi calon ibu kota yang dekat dengan kota *existing* menjadi sumber daya dan dukungan sendiri dalam upaya

pemindahan IKN. Kutai Kartanegara dan PPU berada dekat dengan Balikpapan dan Samarinda yang telah didukung dengan infrastruktur jalan tol, Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang sekitar 45 km, Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto sekitar 76 km serta pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau.

Dari aspek pertahanan dan keamanan, Kalimantan Timur memiliki akses serta dukungan darat, laut, dan udara yang cukup baik. Hal ini sangat diperlukan mengingat salah satu kriteria wajib dari lokasi calon ibu kota negara yaitu memiliki *buffer zone* / benteng pertahanan. Lokasi ibu kota negara harus terlindung, tidak berada di depan atau belakang *territorial* negara Jika sedikit kita rinci, Kalimantan memiliki Kodam VI/ Mulawarman dengan kekuatan militer yang dimiliki di antaranya: TNI AD : Skadron 13 Heli, Penerbad; TNI AL: LantamalXIII Tarakan, Lanal Nunukan, Lanal Sangatta, Lanal Balikpapan, Lanal Kotabaru, Lanal Banjarmasin; TNI AU: Lanud Tarakan, Lanud Balikpapan, Lanud Banjarmasin, Satrad 225 Tarakan, Satrad 223 Balikpapan. Pemindahan ibu kota sekaligus akan memindahkan pusat pertahanan yg saat ini masih berada di

Jawa. Pembangunan pusat pertahanan dengan konsep modern (*smart office – digital approach*) untuk manajemen terintegrasi dengan satuan di daerah lain.

Dukungan Kebijakan dan Anggaran

Dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara nantinya pasti ada *opportunity cost* (biaya) dari kebijakan tersebut dan juga *trade-off* atau akibat dari biaya tersebut. Dari dua hal ini, dalam ekonomi pertahanan harus dipilih yang paling efisien terutama untuk mendukung berjalannya perekonomian dan pertahanan negara. Untuk memastikan proyek ini berjalan siapapun presidennya nanti di 2024, maka diperlukan setidaknya perubahan undang-undang yang membutuhkan proses yang panjang dan perlu dikonsultasikan kepada DPR.

Pemindahan ibu kota negara yang begitu kompleks tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Hal ini menjadi salah satu *problem* terbesar bagi setiap negara yang ingin memindahkan ibu kota negaranya. Mengenai anggaran pemindahan IKN, dalam perjalanannya tentu ada *priority*, ada *choice*, seperti yang terjadi sekarang, di mana pemerintah dihadapkan dengan dua masalah sekaligus yakni pembangunan dan pemulihan dampak pandemi yang

juga membutuhkan anggaran yang sangat besar. Akhirnya dipilihlah untuk merealokasi anggaran pemindahan ibu kota negara untuk menghadapi pandemi terlebih dahulu. Dalam ekonomi, pilihan kebijakan harus ditentukan yang paling efisien dan ilmiah, bukan berdasarkan kepentingan emosional.



Gambar 3. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sumber: Bahan Dialog pemindahan IKN (Bappenas/2019)

Pemindahan Ibu Kota diharapkan menjadi intervensi kebijakan yang akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara dalam Jangka Pendek, Menengah, dan jangka Panjang. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang 2020 sebesar Rp 956,3 triliun. Jumlah tersebut setara 6,09% dari produk domestik bruto (PDB) bahkan sumber lain mengatakan mencapai 6,34%. Artinya

Defisit anggaran terjadi lantaran penerimaan negara jauh lebih rendah dari belanja negara. Nilai defisit tersebut jauh lebih besar bila dibandingkan dengan undang-undang APBN 2020 awal, di mana desain defisit APBN hanya sebesar 1,76 persen dari PDB atau mencapai Rp 307,2 triliun. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp 1.633,6 triliun. Setara dengan 96,1 persen dari target Perpres 72 sebesar Rp 1.699,9 triliun. Realisasi periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 1.960,6 triliun, pendapatan negara mengalami kontraksi 16,7 persen.

Pendapatan negara APBN 2020 yang tadinya Rp 2.233 triliun direvisi menjadi Rp 1.699 untuk Perpres 72 dengan realisasi Rp 1.633. Adapun bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 1.332,7 triliun, penerimaan pajak mengalami kontraksi 19,7 persen. Tentu hal ini menjadi pertimbangan terkait kesanggupan kondisi perekonomian dalam hal pembiayaan untuk memindahkan ibu kota dan seberapa jauh dampak yang ditimbulkan (beban terhadap APBN).

Beberapa ekonom memprediksi ekonomi Indonesia pada tahun 2021 bakal mengalami krisis. Kondisi keuangan negara tercatat defisit hingga Rp500 triliun. Pemerintah bahkan menambah

utang hingga tembus Rp600 triliun. Ada beberapa faktor yang memengaruhinya, seperti besarnya akumulasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rapuhnya ketahanan fiskal, hingga daya beli masyarakat yang rendah. Pendapatan negara terus menurun dan rasio beban bunga juga naik. Defisit meningkat tajam sehingga akhirnya rasio utang juga meningkat tajam. Permasalahan ekonomi bisa menjadi sangat serius lantaran keuangan Indonesia masih terjebak di suku bunga acuan dan kredit yang tinggi. Hal ini tentu membawa akibat kepada semakin buruknya tata kelola keuangan negara dan BUMN terlebih jika memaksakan untuk menjalankan mega proyek infrastruktur yang itu akan turut membebani keuangan negara, terlebih ditengah situasi pandemi saat ini. Dibutuhkan skema pembiayaan dan alternatif pembiayaan yang tepat sehingga tidak menambah hutang dan membebani APBN negara.

Berdasarkan hasil dialog nasional pemindahan IKN mengenai pengelolaan barang milik negara sebagai alternatif sumber pendanaan pemindahan ibu kota negara, didapatkan beberapa sumber skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara diantaranya melalui APBN,

Konsorsium BUMN, Swasta, dan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Alternatif lain yaitu pemanfaatan aset negara/BMN di Jakarta dan IKN baru serta Government/Municipal bonds (Obligasi Badan Otorita). Dari beberapa alternatif tersebut, diperlukan insentif untuk menarik partisipasi swasta seperti melalui Build Operate Transfer, skema Direct Reimbursement maupun skema jaminan risiko.

Kebutuhan untuk pembangunan Ibu Kota baru kurang lebih sebesar Rp466 triliun di mana 19% dari kebutuhan tersebut akan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Biaya tersebut hanya mencakup untuk kebutuhan infrastruktur dasar dan belum termasuk biaya operasional pemerintahan selama masa konstruksi dan biaya operasional pemerintah selama masa transisi. Selain dari APBN, salah satu mekanisme pendanaan pembangunan bisa melalui skema pengelolaan aset di IKN baru dan DKI Jakarta. Mengenai skema pembiayaan, berdasarkan hasil kajian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dukungan anggaran pemindahan ibu kota negara dapat diperoleh dari pengelolaan barang milik negara sebagai alternatif sumber pendanaan pemindahan ibu kota negara.

Berbicara mengenai pemindahan ibu kota dalam perspektif ekonomi pertahanan, salah satu informan menjelaskan bahwa kalau kita memaksakan semuanya dari APBN tidak akan pernah mampu. Satu-satunya jalan tetap melalui KPBU, karena kalau kita mempertahankan dengan APBN, contoh APBN Kemhan saja, 1 tahun maksimal 113 triliun, dari 113 triliun itu 54 triliun untuk gaji pegawai, kemudian 30 triliun untuk belanja barang, sisanya untuk belanja modal. APBN sifatnya hanya sebagai pembuka jalan, pembangunan infrastruktur awal saja. Sulit untuk mengalokasikan anggaran untuk pemindahan ibu kota sedemikian besarnya jika memaksakan menggunakan APBN. Adapun dari sisi kedaulatan, perlu adanya aturan-aturan atau regulasi sendiri yang mengatur kerjasama tersebut, sehingga area-area strategis kawasan ibu kota negara tidak boleh dimiliki oleh swasta.

Terhadap mekanisme pembangunan yang dilakukan oleh BUMN dan KPBU, DJKN selaku pengelola aset negara dapat tetap mengawasi agar pembangunan dimaksud dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh unit special mission vehicle di bawah DJKN. Peran DJKN

dalam proses tersebut lebih pada menjaga APBN agar tetap seimbang dan tidak ditambahi dengan beban pengeluaran pembangunan. DJKN dapat mendorong SMV untuk melakukan penjaminan proyek pemerintah dan menilai kelayakan kredit proyek, sehingga tidak terjadi guncangan terhadap APBN, serta tidak terjadi peningkatan kewajiban penjaminan Pemerintah.

Instansi Terkait untuk Bersinergi

Strategi kebijakan pemindahan ibu kota negara dalam perspektif ekonomi pertahanan membutuhkan instansi atau badan yang bergerak di bidang ekonomi pertahanan maupun komunitas yang potensial dalam pengembangan ekonomi dan pertahanan serta keamanan negara. Untuk dapat menjadikan ibu kota negara Indonesia sebagai pusat pertahanan dan ekonomi keuangan yang baru, Indonesia membutuhkan badan otorita khusus yang berada dibawah garis komando Presiden yang tugasnya melakukan koordinasi untuk dapat memastikan bahwa geliat ekonomi dan pertahanan dapat tumbuh di ibu kota baru sehingga dapat mendukung tujuan Indonesia dalam upaya pemindahan ibu kota negara. Semua kementerian/lembaga dilibatkan dalam proses upaya pemindahan ibu kota negara, termasuk Kementerian ESDM dan

Kementerian KLHK, terutama terkait dengan masalah pembebasan lahan, karna tanahnya kalau tidak terkait dengan tambang pasti terkait dengan hutan.

Ways (Cara Atau Langkah Yang Dilakukan Untuk Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan)

Kerangka Kerja Khusus

Ways merupakan sebuah proses yang digunakan untuk merumuskan cara-cara yang akan ditempuh dalam merencanakan strategi. Ways dilaksanakan dengan menentukan cara yang akan digunakan untuk bertindak, membuat sebuah konsep, dan menentukan metode yang akan digunakan dalam proses pencapaian tujuan. Dalam mengupas pembahasan Ways atau cara, serta hal terkait langkah-langkah yang bisa Indonesia lakukan dalam upaya pemindahan ibu kota negara, peneliti menyusun pembahasan berdasarkan pertanyaan mendasar dan menjabarkannya menjadi beberapa poin utama yang dapat menjelaskan terkait proses pencapaian tujuan pemindahan ibu kota negara baru.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan

masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Berkaitan dengan hal tersebut rencana pemindahan ibu kota negara ini masuk ke dalam daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024.

Pada tahun 2021, Bappenas akan menyusun *master plan* IKN baru. *Master plan* tersebut terdiri dari detail *Master Plan* dan skematik, *siteplan* dan skematik bangunan, skematik infrastruktur dasar, perencanaan infrastruktur dasar, perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, dan perencanaan Kawasan IKN. Sejalan dengan hal tersebut, tahapan perencanaan kebutuhan oleh K/L yang akan digunakan pada IKN baru diharapkan dapat dimulai pada tahun 2020 sampai dengan 2021.

Kementerian PPN/Bappenas sendiri telah membentuk Tim Koordinasi Strategis Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara yang mempunyai sembilan Kelompok Kerja yang beranggotakan wakil-wakil dari berbagai

kementerian dan lembaga (K/L) terkait, yang akan memberikan arahan, panduan dan kendali terhadap Tim Konsultan. Di bawah kendali Tim Koordinasi, Tim Kajian Pendalaman diharapkan dapat bekerja sesuai dengan kerangka acuan kegiatan yang disusun pemerintah serta menghasilkan output dengan kualitas yang sesuai dengan harapan. Di samping itu, diharapkan pula terjadi transfer pengetahuan dan keahlian dari konsultan luar ini kepada tenaga ahli lokal Indonesia.

Paket Strategi

Dalam memindahkan ibu kota negara, tentu dibutuhkan konsep yang matang dan sesuai dengan karakteristik wilayah dan juga masyarakatnya. Ada banyak strategi dan juga *lesson learned* dari negara lain yang dapat dijadikan acuan ataupun suatu paket strategi dalam upaya pemindahan ibu kota negara. Ada bentuk ibu kota yang memisahkan antara pusat ekonomi dan pemerintahannya, adapula yang menggabungkan keduanya agar lebih terpusat. Salah satu strategi yang cukup masuk akal yakni Pelepasan fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan merupakan upaya yang paling memungkinkan dibanding melepas fungsi-fungsi lain seperti pusat keuangan,

pusat bisnis, pusat jasa dan perdagangan, pusat pendidikan, dan sebagainya. Pemindahan ibu kota negara sebagai sebuah prakarsa sektor publik yang dipimpin oleh pemerintah pusat harus dipandang sebagai instrumen paling strategis untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam membangun pola spasial investasi swasta sekaligus mengendalikan arah pertumbuhan wilayah dan kota-kota.

Dalam aspek pertahanan, setidaknya ada beberapa pertimbangan strategi dalam upaya pemindahan ibu kota negara terutama terkait lokasi ibu kota negara nantinya. Hal ini sesuai dengan sistem pertahanan terhadap ibu kota negara di mana gelar kekuatan Militer harus mampu menghadapi segala bentuk ancaman dengan dukungan sistem pertahanan penangkal serangan rudal/roket, pesawat musuh, *infiltran*, sabotase, *siber & Nuclear, Biology, Chemical, Explosive* (NBCE). Terkait aspek pertahanan ibu kota negara dijabarkan oleh Srenum TNI sebagai berikut:

1. Memiliki *Buffer Zone* / Benteng Pertahanan: Lokasi ibu kota negara harus terlindung, tidak berada di depan atau belakang territorial negara serta memiliki akses darat,

laut dan udara jika menghadapi situasi kontinjensi

2. Demografi : Jumlah penduduk yang masih sedikit
3. Posisi Geografis: Berada di tengah Indonesia, sehingga mampu menjembatani ketimpangan sosial ekonomi khususnya Pusat dan Daerah
4. Memiliki akses transportasi dan komunikasi yang baik
5. Ketersediaan lahan: Tersedianya lahan yang luas untuk pembangunan infrastruktur pemerintah
6. Pemindahan pusat pertahanan: Pemindahan ibu kota sekaligus akan memindahkan pusat pertahanan yang saat ini masih berada di Jawa. Pembangunan pusat pertahanan dengan konsep modern (*smart office – digital approach*) untuk manajemen terintegrasi dengan satuan di daerah lain Puskodal
7. Aman dari bencana alam: Lokasi ibu kota tidak berada pada jalur Ring of Fire, sehingga cukup aman dari bencana gempa bumi, erupsi gunung berapi dan tsunami.

Salah satu strategi dalam upaya sistem pertahanan negara ialah dengan membentuk ring pada kawasan

pemerintahan ibu kota negara di mana Ring I terdiri dari Istana Presiden, gedung MPR/DPR, gedung Kementerian/Lembaga, Gedung Kedutaan, kantor Kodal Panglima, Kas Angkatan dan Paspampres sedangkan Ring 2 akan di isi oleh Pangkalan Militer (Mabes TNI, Mabes Angkatan), Balakpus TNI dan Instalasi Militer (Lanud, Dermaga, Perumahan). Hal tersebut guna mengantisipasi serta meminimalisir ancaman terhadap kawasan pusat pemerintahan ibu kota negara. Selain itu, perlu dibentuk Kodam pengaman IKN dan Kodam penyangga IKN dalam pengamanan ibu kota negara serta membangun pertahanan di garis perbatasan, mengingat ada sebagian wilayah Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia.

1. Peluang dan Kesempatan

Indonesia memerlukan Ibu Kota yang dapat merepresentasikan identitas dan persatuan bangsa dalam kerangka *nation and state building* serta mampu merefleksikan kebhinekaan Indonesia. Jakarta bukan simbol representasi identitas bangsa karena bagaimanapun jika kita melihat ke belakang, Batavia (1619) dipilih dan dibangun oleh *Dutch East India*

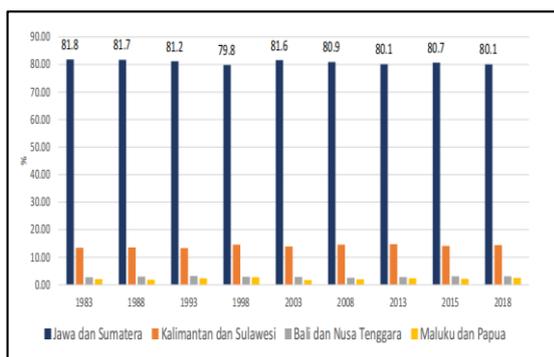
Company (VOC) dan merupakan representasi kepentingan Belanda, bukan kepentingan rakyat Indonesia.

Pembangunan ibu kota sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di tanah air sudah dirumuskan sejak lama, namun tidak kunjung terwujud karena lemahnya kemampuan pemerintah untuk menggerakkan investasi swasta di luar Jawa. Pemindahan ibu kota negara dapat dipandang sebagai peluang bagi pemerintah untuk membangun sektor publik yang kuat untuk menggerakkan investasi di luar Jawa secara efektif.

Bagaimana pemindahan IKN mempengaruhi perekonomian Indonesia dan Provinsi tempat lokasi ibu kota baru sangat menarik untuk dilakukan kajian dan pembahasan lebih mendalam. Ada peluang Penambahan aktivitas ekonomi yang dampaknya terasa secara langsung, melalui Investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung maupun melalui Operasional penyelenggaraan pemerintahan di lokasi baru. Dampak secara tidak langsung yakni *second round effect* yang terjadi karena adanya efek pengganda terhadap perekonomian, sehingga diharapkan

dapat menimbulkan penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan penambahan pendapatan masyarakat.

Kontribusi PDRB Pulau Jawa dan Sumatera selama 35 Tahun Tidak Mengalami Perubahan. Kontribusi PDRB Pulau Jawa dan Sumatera tetap mendominasi dengan angka yang tidak pernah di bawah 80% dari PDB Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah para investor masih memilih Pulau Jawa dan Sumatera untuk tempat berinvestasi. Pemindehan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat merubah orientasi investor dari pulau Jawa ke luar Jawa. Kontribusi PDRB untuk Indonesia berdasarkan pulau dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut:



Gambar 4. Kontribusi PDRB Indonesia Berdasarkan Pulau
 Sumber : Bahan Dialog Kementerian PPN/Bappenas (2019)

Hasil kajian Bappenas (2019) dalam jangka pendek, investasi infrastruktur

untuk pembangunan ibu kota baru akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan dan sekitarnya. Investasi riil diperkirakan akan meningkat 47,7 % di Kalimantan Timur. Proses pembangunan ibu kota baru akan membutuhkan suplai material dan barang ke provinsi Kalimantan Timur yang mengakibatkan peningkatan perdagangan dari Provinsi lain ke Kalimantan Timur. Peningkatan output tertinggi akan terjadi pada sektor konstruksi, kesehatan, dan restoran. Sementara di Provinsi lain seperti Sulawesi Selatan, akan terjadi peningkatan di sektor semen, pertambangan lainnya, serta binatang ternak untuk menyuplai kebutuhan di Kalimantan Timur. Sulawesi Tengah akan menjadi penyuplai utama semen untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan timur.

Pemindehan ibu kota negara ke Kalimantan Timur akan meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional, terutama Sektor Jasa dan akan mendorong diversifikasi ekonomi di Pulau Kalimantan yang selama ini terpusat dengan sektor tradisional seperti batu bara dan perkebunan. Kalimantan Timur adalah

provinsi yang tepat karena memiliki komitmen dalam mempertahankan keseimbangan lingkungan, mampu menjadi representasi kolektif masyarakat Indonesia karena keragaman budaya, serta memiliki potensi peningkatan ekonomi bagi daerah hinterland dan pemasok kebutuhan kota. Pemindahan ibu kota berpeluang akan memberikan dampak ekonomi positif yang akan dirasakan tidak saja pada jangka pendek, tetapi juga pada jangka menengah dan jangka panjang.

2. Hambatan dan Ancaman

Upaya pemindahan ibu kota banyak menuai pro dan kontra baik di kalangan masyarakat maupun pejabat pemerintahan sendiri. Seperti yang di katakan banyak pihak, bahwa saat ini Indonesia sedang berada di masa-masa sulit, terlebih dengan adanya pandemi dan sejumlah bencana alam yang beruntun. Indonesia sedang sulit keuangan sehingga cukup sulit untuk melakukan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam bidang ekonomi, keamanan, dan pendidikan yang merupakan tujuan Negara. Banyak juga yang mengatakan bahwa perpindahan ibu

kota ini hanya untuk kepentingan investor semata.

Dari perspektif ekonomi pertahanan ada beberapa pertimbangan dalam upaya pemindahan ibu kota negara yang bisa dipertimbangkan untuk menunda atau bahkan membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara. Berdasarkan hasil kajian INDEF dari sisi ekonomi ada beberapa poin pertimbangan sebagai berikut :

- a. IKN tidak sesuai perencanaan
- b. Arah ekonomi IKN
- c. Penerimaan pajak, dan potensi masalah pengembalian utang
- d. Rasio Pajak terhadap GDP (Tax/GDP Ratio) relatif rendah
- e. Proyek infrastruktur dan proyek RPJMN lain kesulitan pembiayaan
- f. Tidak menyelesaikan masalah utama di Jakarta
- g. Tidak menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia: Industrialisasi Prematur, Jebakan Pendapatan Menengah, eksternalitas negatif pencemaran lingkungan, ketergantungan terhadap dua komoditas ekspor utama (batu bara dan sawit)
- h. Ketersediaan dan Transisi Energi

i. Data akurat untuk keperluan kajian Lembaga di luar pemerintahan

Dalam intelijen Strategis, pakem penilaian dasar sembilan komponen pada intelijen strategis (Intelstrat) merupakan sebuah acuan para analis intelijen dalam menilai serta mengukur kekuatan, kemampuan serta kerawanan sebuah negara. Komponen tersebut adalah Ipoleksosbudhankam serta komponen biografi, demografi serta sejarah. Apabila secara khusus kita memerhatikan komponen ekonomi, kita faham bahwa memang kini pada era pemerintahan Presiden Jokowi sedang terjadi perlambatan perekonomian (belum disebut krisis).

Salah Satu alasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yakni pemerataan ekonomi. Tahun lalu, perekonomian provinsi Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda ini hanya tumbuh 2,67 persen secara tahunan atau lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 5,17 persen. Salah satu informan yang merupakan Ekonom senior menyatakan bahwa tidak ada kaitan secara langsung antara pemindahan ibu kota negara dengan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya tidak ada negara yang ingin

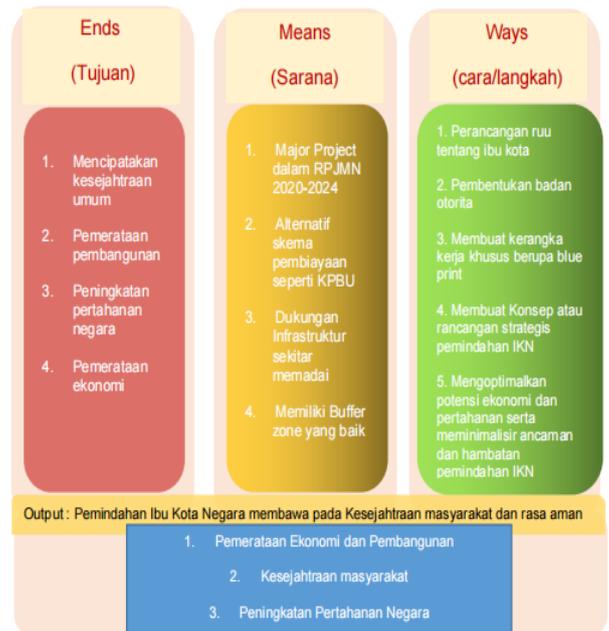
meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemindahan ibu kota.

Perpindahan ibu kota dalam sudut pandang intelijen ekonomi yang berfokus pada penciptaan profil pesaing, terutama mengidentifikasi aksi dan reaksi pesaing sebagai implikasi dari adanya perubahan industri dan kinerja organisasi, dapat di katakan sebagai megaprojek ibu kota baru. Melalui laporan bertajuk 'Ibu Kota Baru Buat Siapa?' yang dikeluarkan Koalisi, ditemukan 162 konsesi perusahaan di 180.965 hektar lahan ibu kota baru. Laporan itu disusun oleh Jatam bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Forest Watch Indonesia, Trend Asia, dan sejumlah LSM lainnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 158 lahan merupakan konsesi batu bara. Sisanya merupakan lahan konsesi pertambangan lain, kehutanan dan sawit. Laporan itu menyebut rencana pemindahan ibu kota menunjukkan ada indikasi kuat bahwa megaprojek ini hanya menjadi komoditas politik semata.

Potensi ancaman pertahanan di Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru memang dinilai lebih kecil karena daerah itu lebih tertutup daripada

Jawa. Meski potensi ancaman kecil, pemerintah harus tetap mengembangkan kekuatan pertahanan. Pertimbangannya, secara geografis Kaltim dekat dengan negara tetangga seperti Malaysia hingga Filipina, sehingga ke depan Indonesia lebih mudah diinvasi lantaran pindah ke Kaltim. Ancaman seperti eksodus yang pernah menjadi isu di Kalimantan Timur beberapa tahun lalu jangan sampai terulang karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap beberapa wilayah di Kalimantan Timur, khususnya wilayah terluar yang berbatasan secara langsung dengan negara Malaysia. Peperangan saat ini dan masa yang akan datang berada di wilayah siber. Jadi mau pindah ke daerah terpencil sekalipun tidak pengaruh. Karena ancamannya bukan pendudukan, tapi siber dan sebagainya.

Analisis Strategi dalam upaya pemindahan ibu kota negara dalam perspektif ekonomi pertahanan telah dijabarkan dari rumusan masalah yang ada. Secara umum, strategi ini dirangkum dalam bagan berikut:



Gambar 5. Strategi Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dari penelitian ini, perlu dipertimbangkan kembali urgensi pemindahan IKN terutama dari analisis strategi bahwa (1) Tujuan dasar pemindahan IKN harus berdampak pada pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan pertahanan negara, (2) Sarana yang dimiliki dalam upaya pemindahan IKN, selain didukung dengan SDM dan instansi terkait, juga dengan potensi unggulan yang dimiliki Kalimantan Timur. Dukungan kebijakan serta alternatif skema pembiayaan juga diperlukan untuk mendukung tercapainya pemindahan IKN, (3) Cara/langkah yang diterapkan oleh kementerian atau lembaga terkait, yakni membuat kerangka kerja khusus

dan paket strategi, mengoptimalkan peluang dan kekuatan serta antisipasi terhadap hambatan dan ancaman. Kesimpulannya bahwa strategi yang diterapkan dalam upaya pemindahan IKN diharapkan dapat mendukung perwujudan ekonomi pertahanan dengan terbentuknya sistem IKN baru yang memiliki instrumen pertahanan nirmiliter (*bargaining power*) serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan umum.

Rekomendasi saran dalam upaya pemindahan ibu kota negara yang sesuai dengan konsep ibu kota yang ideal dalam perspektif ekonomi pertahanan yakni (1) diperlukan komitmen serta kerja keras dari semua pihak dalam upaya pemindahan ibu kota negara terutama untuk meluruskan tujuan pemindahan ibu kota negara atas dasar kepentingan nasional. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali urgensi pemindahan ibu kota negara dalam jangka panjang, bagaimana dampak serta manfaat yang akan ditimbulkan terutama dalam situasi dan kondisi seperti saat ini di mana Indonesia masih dihadapkan dengan sejumlah masalah seperti pandemi dan bencana alam. Jangan sampai pemindahan ibu kota negara hanya menjadi sebuah mega proyek

untuk kepentingan politik dan elit tertentu saja, (2) diperlukan sinergi antar instansi terkait, serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Timur dalam mencari alternatif sarana maupun sumber daya pendukung lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung pemindahan ibu kota negara tanpa membawa pengaruh buruk serta potensi konflik ke wilayah Kalimantan Timur. Disamping itu, rekomendasi untuk Kementerian dan Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya perlu memprioritaskan Undang-Undang mengenai pemindahan ibu kota negara sebagai agenda prolegnas untuk mengatasi kekosongan hukum dan mempercepat upaya pemindahan IKN. Mengingat peran ibu kota negara dalam masa depan Indonesia, maka kehadiran hukum mampu menjadi landasan dalam percepatan pemindahan ibu kota negara (3) kedepannya perlu pendalaman dan *finalisasi* beberapa kebijakan dalam hal pembentukan badan otorita, membuat kerangka kerja khusus berupa *blue print* pemindahan IKN, membuat Konsep atau rancangan strategis pemindahan IKN serta mengoptimalkan potensi ekonomi dan pertahanan dalam meminimalisir ancaman dan hambatan pemindahan IKN. Kementerian Pertahanan perlu juga

mempertimbangkan adanya tim khusus yang mengkaji pertahanan untuk menghadapi ancaman baik militer dan non militer dalam upaya pemindahan ibu kota negara. Terakhir untuk Akademisi atau peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai strategi pemindahan ibu kota negara khususnya dalam peningkatan sektor ekonomi dan pertahanan.

Daftar Pustaka

- Alika, rizky. Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara Tetap Jalan di Tengah Pandemi Corona, dikutip dari <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5f368ded45bfa/proyek-pemindahan-ibu-kota-negara-tetap-jalan-di-tengah-pandemi-corona>, pada 19-11-2020.
- Balitbang Pontianak. (2018). Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kajian Aspek Sosial Budaya (Wacana Palangka Raya Sebagai ibu kota Republik Indonesia).
- Creswell, J. W. (2003). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches* (2nd ed). California: Sage Publishing.
- Creswell, John W. (2008). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Bandung; Edisi Ketiga Pustaka Pelajar
- Hutasoit, W. L. (2018). Analisa Pemindahan ibu kota Negara. *Dedikasi*, 19(2), 108–128.
- Kementerian Pertahanan Indonesia. (2016). *Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia.
- Hartley, Keith & Sandler, Todd (1995). *The Hand Book of Defense Economics*. California: Elsevier Science.
- Mintzberg, H., & Quinn, J. (1991). *The Strategy Process: Concept, Context, and Cases*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Setiadji, A. (2020). *Ekonomi Pertahanan Menghadapi Perang Keenam*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia
- Supandi. 2019. *Text Book Ekonomi Pertahanan (Defense Economy) 13 Wawasan Studi Ilmu Ekonomi Pertahanan*. Jakarta: CV. Makmur Cahaya Ilmu
- Shalih, O., Toun, N. R., Kebencanaan, B. T., Aprinae, O., Ito, Y., Faculty, I. S., Komiya, K., Kotani, Y., Supriyatno, M., & Yahya, M. (2018). *Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1 - Februari 2018. Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 14(1), 21.
- Supriyatno, M. (2018). *Pertimbangan Pemindahan ibu kota Negara Ditinjau Dari Perspektif Geografi Pertahanan. Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v3i1.373>
- Taufik, M. (2017). *Pemindahan Ibu Kota Dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi. Prosiding Seminar Nasional Pemindahan ibu kota Negara 2017, November*, 99–115.
- Thomas, Vincent Vabian. *Untung Rugi Menunda Proyek Ibu Kota Baru di*

Tengah Pandemi COVID-19, dikutip dari <https://tirto.id/f4gz>, pada 19-11-2020.

Yusgiantoro, P. (2014). *Ekonomi Pertahanan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia